**MAROS PADA MASA DI/TII 1953-1965\***

**(Maros in The Period Of DI/TII in (1953-1965)**

**Nur Asma[[1]](#footnote-2)\*\***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui tentang Maros pada masa DI/TII 1953 – 1965, (ii) mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung sehingga Maros menjadi rebutan antara pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) serta (iii) untuk mengetahui dampak sosial politik yang ditimbulkan dari gerakan DI/TII di Maros.

Jenis penelitian ini adalahpenelitian sejarah yang menggunakan metodologi sejarah dalam penyusunannya dan prosesnya berfokus pada masa sekitar peristiwa DI-TII Tahun 1953-1965. Teknik analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) Maros merupakan salah satu wilayah basis pertahanan DI/TII dengan beberapa tempat operasi. Pergerakan pasukan DI/TII di Maros diwarnai banyak kekacauan yang sangat merugikan masyarakat. DI/TII menguasai hampir setengah wilayah Maros seperti daerah Pappandangeng sampai Tompobulu, Pakkasalo, Pakere, Laiya, Camba, Moncongloe, Masale, Leang-leang, Lau, dan Marana. Namun dari struktur daerah di Maros, terdapat dua wilayah yang secara penuh menjadi basis perjuangan dan perekrutan anggota DI/TII karena keadaan alamnya yang bergunung-gunung dan banyak hutan lebat. Dua wilayah itu adalah Camba dan Moncongloe, (ii) Terjadi perebutan wilayah *de facto* antara DI/TII dan TNI karena keduanya menganggap Maros memiliki posisi strategis. Maros ibarat pintu yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Maros juga merupakan daerah yang menghubungkan Makassar sebagai Pusat pemerintahan dengan daerah lainnya. (iii) selama berlangsungnya gerakan DI/TII di Maros, banyak masyarakat hidup dalam ketakutan, mereka hidup berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menghindari pasukan DI/TII dan TNI.

Kata Kunci: Maros, DI/TII

**ABSTRACT**

NUR ASMA. Maros in the Period of DI/TII in 1953-1965 (supervised by Jumadi and Ahmadin).

The research animed to discover (i) Maros in period of DI/TII in 1953-1965, (ii) the supporting factors so that Maros became a bone of contention between Tentara Nasional Indonesia(TNI) party and the troops of Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), and (iii) the sociopolitical impact caused by the movement of DI/TII in Maros.

The research was historical research which employed history metodology in the compilation and the process was focused on the time between the incident of DI/TII in 1953-1965. The data analysis technique was conducted in four stages, namely heuristic, source critic, inpretation.

The results of the research revealed that: (i) Maros was one of the regions as a defense basis of DI/TII with several operation places. The movement of DI/TII troops in Maros was caused by various choses which harmed the poeple. DI/TII controlled almost half of Maros region such as Pappandangeng until Tompobulu, Pakkasalo, Pakere, Laiya, Camba, Moncongloe, Masale, Leang-leang, Lau and Marana. However, based on the area structure in Maros, there were two regions fully as the fighting basis and recruitment of DI/TII members because of the natural conditions such as mountainous and dense forest. The two regions were Camba and Moncongloe, (ii) there was seizure of de facto territory between DI/TII and TNI because both considered that Maros had trategic position . Maros was also a region which connected Makassar as the central government with other regions, (iii) during the movement of DI/TII in Maros, many people were living in fear. They were moving from one region also gave many impacts to the society, particularly in sociopolitical, economy, education, and religion aspects.

Keyword: Maros, DI/TII

**PENDAHULUAN**

Munculnya berbagai persoalan pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 merupakan kenyataan yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi babak baru dalam proses mengIndonesia. Sudah menjadi fenomena umum bahwa suatu bangsa yang baru merdeka selalu diwarnai oleh berbagai persoalan, baik dalam hal menata ketatanegaraan maupun persoalan intern mengenai proses pengintegrasian nasional suatu bangsa.

Salah satu gerakan pemberontakan yang berlangsung pada masa awal kemerdekaan adalah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan Darul Islam dipimpin oleh S. M. Kertosuwiryo di Jawa Barat. Gerakan ini muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap keputusan diplomatik perjanjian Renville pada tahun 1948, yang kemudian mendorong mereka mengorganisasikan diri kedalam satu kesatuan gerakan pemberontakan.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berperan aktif dalam gerakan peristiwa DI/TII adalah Maros. Letak strategis Maros yang berada pada perlintasan yang menghubungkan daerah-daerah di Sulawesi Selatan memainkan peran yang begitu besar sehingga wilayahnya menjadi rebutan untuk diduduki oleh pihak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dikomandoi oleh Abdul Qahhar Mudzakkar dan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki pusat kendali operasi di Makassar.

Pergerakan DI/TII telah membawa suatu perubahan yang begitu besar. Gerakan ini telah membawa pengaruh dalam perubahan sosial politik masyarakat Maros. Pada hakekatnya peran dan partisipasi Maros pada gerakan DI/TII belum sepenuhnya tampak kepermukaan bahkan berkesan tampak terabaikan dalam sejarah gerakan ini. Oleh sebab itu penulis berusaha menghadirkan berbagai hal yang terjadi di Maros dalam hubungan kejadian peristiwa DI/TII di Sulawesi Selatan sebagai basis utama ruang pergerakan.

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut diatas, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk keperluan mengungkap berbagai hal sebagai berikut : (1) Bagaimana jalannya pergerakan DI/TII 1953 – 1965 di Maros ? (2) Mengapa Maros menjadi rebutan antara pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ? (3) Bagaimana dampak sosial politik yang ditimbulkan oleh gerakan DI/TII 1953– 1965 di Maros ? Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Memberikan gambaran dan penjelasan tentang pergerakan DI/TII 1953 – 1965 di Maros. (2) Memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung sehingga Maros menjadi rebutan antara pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). (3) Mengetahui dampak sosial politik yang ditimbulkan dari gerakan DI/TII di Maros.

Dewasa kini kita semua sering menjumpai aksi-aksi demontrasi yang dijalankan oleh gerakan-gerakan sosial baik dari kalangan mahasiswa maupun elemen masyarakat. Ini semua karena mereka peduli terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Tak bisa di pungkiri bahwasanya gerakan-gerakan sosial sangatlah berpengaruh terhadap perjalanan perkembangan bangsa Indonesia ini.

Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem yang dianggap cacat.

Gerakan sosial adalah suatu upaya yang kurang lebih keras dan teroganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang relatif besar jumlahnya, entah untuk menimbulkan perubahan, atau untuk menentangnya **(**Maran, 2001: 65). Suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat (Jary, 1995 : 614-615).

Munculnya Teori Sosiologi secara langsung dipengaruhi oleh faktor terjadinya revolusi politik dan revolusi industri yang melanda masyarakat Eropa terutama pada abad 19 dan awal abad 20. Revolusi industri menyebabkan terjadinya birokrasi ekonomi berskala besar untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan industri dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis hanya segelintir orang yang mendapat keuntungan yang sangat besar sementara sebagian besar orang lainnya meneripa upah yang rendah. Hal ini menimbulkan pergolakan dan reaksi menentang sistem industri dan kapitalisme yang diikuti oleh ledakan gerakan buruh. Pergolakan inilah yang sangat mempengaruhi para sosiolog untuk mempelajari masalah tersebut dan berusaha keras mengembangkan program yang dapat membantu menyelesaikan masalah itu (Ritzer dan Douglas, 2004 : 7).

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan ini yang mempengaruhi sebagian besar daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara selama bertahun-tahun dibawah kepemimpinan oleh Kahar Muzakkar.

1. **Lahirnya Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan**

Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan adalah sebagai hasil akumulasi berbagai persoalan dan watak khas  Sulawesi Selatan. Berbagai faktor mendorong gerakan ini muncul di Sulawesi diantaranya rasionalisasi Tentara yang dilakukan oleh petinggi APRIS. Dimana pada saat itu untuk dapat bergabung dan menjadi prajurit resmi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) gerilyawan haruslah memiliki pendidikan formal serta memiliki kecakapan fisik yang mendorong, yang oleh Kolonel AH. Nasution  dikatakan bahwa tentara itu harus profesional serta mempunyai struktur yang jelas.

Faktor lain yang mendorong munculnya Darul Islam adalah faktor agama. Agama turut menjadi “alat ampuh” dalam mengobarkan gerakan Darul Islam semboyan gerakan ini dalam propagandanya untuk mengobarkan perlawanan adalah perjuangannya adalah perang suci (jihad) dalam menegakkan *Daar al-islam*. Dalam Islam tiga puncak ibadah yakni shalat, puasa serta jihad.

1. **Abdul Qahhar Mudzakkar dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan**

Abdul Qahhar Mudzakkar bernama lengkap Abdul Qahhar Mudzakkar, lahir di Desa Lanipa, Kabupaten Luwu pada tanggal 24 Maret 1921. Dia anak seorang petani yang cukup mampu, keluarganya memiliki sawah dan ladang yang memadai, karena itu pada usia tujuh belas tahun ia dikirim ke Surakarta untuk belajar di sebuah Perguruan Islam, sebuah sekolah yang dikelolah organisasi Muhammadiyah.

Lokasi Muallim Muhammadiyah, tempatnya mengecap pendidikan berada persis di jantung kota. Fasilitas pendidikan yang disediakan pun cukup. Selain dididik dalam mengembangkan pengetahun, wawasan keilmuan, siswa juga diberikan pengetahuan keagamaan yang ketat. Kahar aktif dalam organisasi kepemudaan. Namun, pendidikan yang ditempuhnya hanya tiga tahun yakni sejak tahun 1938-1941. Dia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya setelah menikah dengan seorang gadis dari Solo sebelum Tahun 1940.

Dalam kedudukan barunya, Abdul Qahhar Mudzakkar (pada waktu itu dinaikkan pangkatnya ketingkat Letnan Kolonel) diberikan tugas mengkordinasi satuan-satuan gerilya di Indonesia Timur (meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa tenggara). Namun sebelum pasukan TNI XVI diekspedisikan ke Indonesia Timur, Abdul Qahhar Mudzakkar lebih dahulu mengirim kordinator untuk mewakili dirinya untuk mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan gerilya yang masih tersisa. Abdul Qahhar Mudzakkar mengirim orang-orang kepercayaannya yaitu Letnan Satu Saleh Syahban dan Kopral Bahar Mattaliu ke Sulawesi Selatan pada Tahun 1949 untuk mengadakan konferensi gerilya se- Sulawesi Selatan.

1. **Gerakan Gerilya Menuju Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia**

Konferensi gerilya menunjukkan keberhasilan dalam menyatukan semua kelompok gerilya bersenjata ke dalam formasi angkatan bersenjata. Formasi ini selanjutnya disebut KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan). KGSS resmi terbentuk di akhir tahun 1949.

Tahun 1950, situasi politik dan militer di Sulawesi Selatan diwarnai oleh banyak konflik. Pasukan KNIL pimpinan Andi Abdul Azis menolak ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan yang diperintahkan Presiden Soekarno, termasuk ekspedisi pimpinan H. V. Worang. Penolakan itu dianggap oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai pemberontakan Andi Abdul Azis. Penolakan pasukan KNIL, tidak menghentikan ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan. Ekspedisi ini masih tetap berlangsung sampai Andi Abdul Azis menyerah.

Setelah pemberontakan KNIL di bawah pimpinan Andi Abdul Azis berhasil diredam, anggota satuan KNIL yang terlibat diharuskan keluar dari wilayah Sulawesi Selatan agar tidak ada lagi penghalang untuk membubarkan Negara Indonesia Timur. Tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah Republik Indonesia Kesatuan secara resmi memproklamasikan bahwa eksistensi Indonesia Serikat telah berakhir.

Setelah kekalahan KNIL, pasukan pemerintah berusaha menguasai satuan-satuan gerilya di Sulawesi Selatan. Akan tetapi beberapa kebijakan pemerintah Indonesia sebelumnya seperti menghentikan gencatan senjata dengan Belanda dan melanjutkan pertempuran dengan KNIL sesudah 1949 telah membuat gerilyawan menjadi kecewa. Terlebih lagi saat tuntutan mereka membentuk satu brigade sendiri di Sulawesi Selatan yang diberi nama brigade Hasanuddin ditolak oleh Kawilarang dalam pertemuannya dengan Abdul Qahhar Mudzakkar 1 Juli 1950. Keinginan Abdul Qahhar Mudzakkar, untuk membentuk Brigade Hasanuddin dengan semua anggotanya merupakan anggota gerilya diawali dengan penggabungan mereka ke dalam CTN tidak kesampaian. Puncaknya Kahar akhirnya menolak penyelesaian masalah gerilya melalui CTN. Dia kemudian mereorganisasi CTN menjadi TKR (Tentara Kemerdekaan Rakyat). Tanggal 7 Agustus 1953, Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) dialihkan menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) yang diawali dengan Proklamasi *Darul Islam* yang dinyatakan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Hal lain yang juga menurutnya sebagai lanjutan kecurangan terhadap KMB adalah membatalkan “uni- Indonesia Belanda”, secara sepihak melikuidasi modal Belanda dan menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Ketidak setujuan Abdul Qahhar Mudzakkar terhadap tindakan-tindakan ini diungkapkannya:

“Saya tidak membela Belanda, saya tidak pernah mau membela penjajah, sejak mulai diadakannya Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang membuahkan perjanjian Linggarjati, Renville, dan KMB, saya selalu saja menyatakan bantahan saya kepada pihak Soekarno, dan menyebabkan pada akhirnya saya memberontak terhadap rezim Soekarno”

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa pemberontakan Qahhar juga dilandasi oleh kekecewaan terhadap beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Titik awal dari gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, yaitu mundurnya Letkol Abdul Qahhar Mudzakkar dari APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Tanggal 1 Juli 1950 Qahhar mencopot tanda pangkat dipundaknya  serta segala simbol-simbol kemiliteran, kemudian diserahkan secara baik-baik kepada Kol. AE. Kawilarang, Panglima Territorium IV Indonesia Timur, sejak saat itu Qahhar menyatakan keluar dari APRIS dan bergabung bersama gerilyawan-gerilyawan dipedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan.

Sejak menyatakan bergabung dengan Darul Islam, maka perjuangan dari Darul Islam Sulawesi Selatan kian meluas, serta mendapat respon positif baik dari beberapa tokoh, maupun Organisasi Islam yang ada di Sulawesi Selatan.

Organisasi yang mendukung itu meskipun secara tidak langsung, adalah *MASYUMI, MUHAMMADIYAH, PSII*, serta lembaga pendidikan Islam *DDI* pimpinan Anre’gurutta, H. Abdurrahman Ambo Dalle.

Antara tahun 1959 – 1962, TNI mulai berhasil menekan Gerakan ini, karena disebabkan oleh perpecahan di tubuh Gerakan Darul Islam sendiri. Pada tahun 1962, Qahhar mencoba bertahan ditengah kesendiriannya, ia berusaha merealisasikan idenya mendirikan Negara Islam yang beliau cita-citakan selama ini.

Abdul Qahhar Mudzakkar kemudian beserta sisa-sisa pasukannya kemudian memproklamasikan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). RPII ini merupakan negara Islam yang berpusat di Sulawesi Selatan, bukan lagi sebagai bagian dari Darul Islam Jawa Barat, yang pada waktu itu sudah dilumpuhkan oleh TNI. Qahhar sendiri yang menjadi Presiden/Chalifah RPII, dengan gelar militernya yang tertinggi ditubuh Darul Islam ialah *Kolonel*.

Karena banyak tokoh Darul Islam Sulawesi Selatan menyerah  atau ditangkap, diantaranya Bahar Mataliu dan Usman Balo menyerah, serta Nurdin Pisok tertangkap. Akhirnya disusul dengan Sang Maestro gerakan Darul Islam Sulawesi Selatan, kemudian menghembuskan napas terakhir ditangan Kopda Sadeli, prajurit dari Yon 330 Kujang I Siliwangi. Pada tanggal 3 Februari 1965 di Tepi Sungai Lasolo’ di Desa Laiyu Sulawesi Tenggara.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metodologi sejarah dalam penyusunannya (Sjamsuddin, 2012:14), metodologi sejarah merupakan penyusunan konsep-konsep dan model-model dan pembuatan eksplanasi-eksplanasi umum dan lebih rinci mengenai tipe-tipe peristiwa-peristiwa dan proses-proses tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab dari peristiwa dan proses-proses sebenarnya. Dalam metodologi ini membahas mengenai kerangka-kerangka pemikiran tentang konsep-konsep, kategori-kategori, model-model, hipotesis, dan prosedur umum yang dipakai dalam penyusunan teori dan testing.

**Selanjutnya metode sejarah menurut Kuntowijoyo (2003:209), dalam metode sejarah yaitu mengubah sejarah sebagai humanity dengan pendekatan hermeneutics (menafsirkan) yang memahami (understand, vestehen). Untuk menjadi sejarah yang menerangkan (explain, erklaren). Memahami seseorang berarti mengerti ’’dari dalam’’ berdasar makna subjektif’’ dan menerangkan dari luar dengan menggunakan bahasa ilmu (hubungan-hubungan kausal).**

Lokasi penelitian ini merupakan kajian peristiwa sejarah, yakni mengenai Maros Pada Masa DI-TII 1953-1965, yang mana peristiwa tersebut yang terletak di distrik Maros di wilayah Sulawesi Selatan pada masa lalu dan kabupaten Maros pada masa sekarang. Penentuan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sebagai daerah yang mempunyai peranan penting pada masa DI-TII 1953-1965 karena merupakan daerah yang diperebutkan antara Tentara Nasional Indonesia dengan laskar-laskar pasukan DI-TII yang ada diberbagai distrik di Sulawesi Selatan.

Sumber data yang paling utama dalam ilmu sejarah adalah pada hakekatnya dibagi atas dua, yakni sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah arsip. Sumber data dari arsip tersebut dapat ditemukan sesuai dengan zaman terjadinya peristiwa.

Teknik pengumpulan data dalam sejarah disebut heuristik, dimana kegiatan ini dapat membantu sejarawan untuk mencari jejak-jejak peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Teknik analisis data yang digunakan adalah kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

**HASIL PENELITIAN**

Kedudukan Maros yang dianggap sangat strategis seringkali menjadi rebutan kekuasaan, bukan hanya oleh kerajaan-kerajaan yang berada disekitarnya pada masa pemerintahan kekaraengan berlaku tetapi juga bagi para gerilyawan-gerilyawan (pemberontak) pasca proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah yang menyebutkan munculnya gerilyawan-gerilyawan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar di Maros menandakan posisi Maros yang dianggap memiliki peranan sangat penting pada masa itu.

Dimulai dari penyelesaian konflik antara APRIS dan KNIL, Maros (khususnya di wilayah Mandai) menjadi tempat paling penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dg. Esa :

“waktu terjadinya pertempuran besar di Ujung Pandang, orang-orang yang datang dengan pesawat dari jakarta hanya bisa mendarat di Lapangan Mandai. Dari sana barulah mereka bisa menuju tempat lain dengan mobil. Banyak orang-orang penting dari luar yang ingin ke Ujung Pandang, Pare-pare, Bone atau dimanapun mendarat di Mandai (Maros) dulu”.

Peran Maros juga nampak dalam proses gerakan para gerilyawan (KGSS) pada awal mulai merumuskan tuntutan-tuntutannya. Pada bulan Desember 1949, diadakan konferensi di Maros yang dihadiri oleh semua komandan Batalyon, yang menghasilkan dua keputusan penting, yaitu: (1) pembentukan KGSS dengan komandannya adalah Saleh Syahban dan Mustafa sebagai kepala staf dan (2) mengusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta agar supaya KGSS dijelmakan menjadi satu divisi (yang diberi nama) Hasanuddin dan menetapkan *overste* Abdul Kahar Mudzakkar sebagai komandan divisi.

Menyikapi sikap tegas Abdul Kahar Mudzakkar tersebut, maka pada hari yang sama pula Panglima Komando Tentara Territorium Indonesia Timur mengeluarkan sebuah pernyataan politik yang dikenal dengan *Dekrit Kawilarang.* Isi dekrit ini menegaskan bahwa semua personil KGSS dan lain-lain organisasi gerilya di luar APRIS dibubarkan dan segala usaha untuk melanjutkan atau menghidupkan kembali organisasi gerilya dilarang.

Selama berada di hutan, pasukan DI/TII memperkuat posisi dengan cara melakukan reorganisasi (penataan kembali) kesatuan-kesatuan ketentaraannya. Seperti yang diungkapkan oleh Dg. Duddin dirinya bertemu pertama kali dengan Nurdin Pisok ketika Nurdin bersama beberapa anggotanya (waktu itu masih beberapa orang) lari dari Ujung Pandang dan bersembunyi di Hutan. Dia sempat diminta menyembunyikan sebuah Mobil yang dirampas oleh Nurdin Pisok di hutan bambu. Untuk beberapa saat Nurdin Pisok dan beberapa anggotanya tersebut menetap di hutan di daerah Pa’lengukang hingga akhirnya meninggalkan tempat persembunyiannya setelah anggota mereka sudah bertambah banyak. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Nurdin Pisok saat itu telah melakukan reorganisasi anggota yang kemudian dipersiapkan sebagai Tentara Islam Indonesia.

Seperti yang dinyatakan oleh H. Lahami Dg Paranrengi pada wawancara tanggal 28 April 2015:

“... kalau malam biasanya gerombolan (pasukan DI/TII) datang kerumah-rumah warga. Mereka diberi makan, tapi tidak memaksa. Cuma warga takut. Biasanya kalau makan dirumah warga ada satu orang jaga, kalau ada anggota TNI biasanya mereka langsung sembunyi di *Rakkeang*..”

Sebenarnya gerakan DI/TII di bawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar memiliki perangkat-perangkat yang lengkap dalam melakukan mobilisasi gerakan. Kaitannya dengan upaya reformasi Divisi Hasanuddin, Abdul Qahhar Mudzakkar telah membentuk dan melantik Divisi/KW I Hasanuddin untuk wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara dibawah pimpinan Syamsul Bachri Fatta, dan Divisi/KW II 40.000 untuk Sulawesi Selatan di bawah pimpinan M. Bahar Mattalioe.

Pada tahun 1953 sampai dengan 1965 Maros merupakan salah satu wilayah basis pertahanan DI/TII. Menurut H. Lahami Dg Paranrengi, tokoh-tokoh gerilyawan DI/TII di Maros antara lain Andi Toeng, Usman Balo dan Nurdin Pisok. Saat itu kelompok gerilyawan juga dikenal dengan istilah *Momok Hitam*.

Pasukan DI/TII menguasai hampir setengah wilayah Maros. Seperti yang dipaparkan oleh H.Lahami Dg Paranrengi:

“Gerombolan DI/TII menguasai separuh daerah maros kecuali kota (dikuasai oleh Jawa). Mulai dari daerah Pappandangeng sampai Tompobulu. Selain itu, Gerombolan DI/TII juga menguasai Pakkasalo dan Pakere. Tokoh DI/TII di Pakkasalo adalah dg. Songko dan di Pakere oleh dg. Awing”

Dari struktur daerah, di Maros terdapat dua wilayah yang secara penuh menjadi basis perjuangan dan perekrutan anggota DI/TII karena letak wilayahnya yang strategis. Dua wilayah itu adalah Camba dan Moncongloe.

Status wilayah camba sekarang berbeda dengan dulu. Pada masa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), wilayah camba belum mengalami pemekaran. Mallawa dan Cenrana masih bagian dari Kecamatan Camba.

Wilayah bagian Selatan dari Sulawesi Selatan dikuasai oleh satu Resimen Darul Islam yang dibagi kedalam empat Batalyon, yakni Yon I berkedudukan di Maros, Yon II berkedudukan di Pangkajene, Yon III berkedudukan di Jeneberang (Gowa), Yon IV berkedudukan di Takalar/Turatea.

Batalyon I yang berkedudukan di Bonto Somba, Tanralili, Maros, dipimpin oleh Mayor Nurdin Pisok, disinilah dikendalikan pemerintahan Militer dan sipil Darul Islam. Kedudukan Nurdin Pisok sebagai Komandan Batalyon juga diperkuat dengan pernyataan Andi Muhammad Ilyas:

“Maros masuk dalam batalion 40.000 dibawah pimpinan Nurdin Pisok. Biasanya kami sekali-kali dipanggil ke *Masale’* untuk menghadiri pertemuan dengannya. Disitulah biasa berkumpul semua tokoh DI/TII dari masing-masing daerah di Maros”

Pada mulanya pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar menguasai bagian besar daerah-daerah pedesaan, dengan mengisolasi tentara-tentara di kota-kota kecil dan kota-kota besar. Usaha tentara untuk menjaga agar jalan-jalan raya tetap terbuka menjadi sia-sia. Perjalanan melalui jalan raya mungkin dapat dilakukan tetapi dengan pengawalan pasukan bersenjata. Jalan satu-satunya yang mungkin aman dilalui adalah jalur laut. Rombongan pemerintahpun yang melakukan perjalanan ke Bone terpaksa melalui jalur laut karena jalan-jalan raya dipedalaman tidak dapat dilalui.

Maros adalah daerah yang berada pada posisi strategis yang merupakan gerbang penghubung antar daerah-daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar dan Bone. Maros juga sebagai tempat persinggahan. Menguasai maros berarti menguasai daerah yang menjadi kunci penghubung antara masyarakat daerah dan masyarakat yang ada dipusat pemerintahan Makassar.

Tindakan beberapa gerombolan pada masa DI/TII di Maros dikenal sangat sadis. Mereka beberapa kali melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap masyarakat. Hal ini sangat meresahkan dan menjadikan masyarakat senantiasa hidup dalam ketakutan. Situasi demikian menjadikan masyarakat Maros tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas. Mereka memilih bersembunyi dan vakum sementara dari pekerjaan sehari-hari mereka. Terbatasnya melakukan aktivitas sosial dalam kemasyarakatan menjadikan mereka menjadi individualis.

Ketatnya penegakan syariat Islam sebagai aturan yang ditetapkan oleh Darul Islam juga dipertegas oleh A. Muhammad Ilyas (seorang narasumber yang merupakan mantan anggota DI/TII), dia mengatakan bahwa saat itu aturan yang diterapkan sangat ketat apalagi bagi perempuan. Mereka diwajibkan menutup aurat (mengenakan kerudung) sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur’an. Jika ditemukan ada wanita yang melakukan pelanggaran, para eksekutor yang telah ditunjuk oleh pasukan DI/TII siap memberikan sanksi.

Selain aturan mengenakan jilbab/kerudung bagi perempuan, penegakan syariat Islam secara menyeluruh juga ditunjukkan dengan tata cara ibadah. Sebagai mana yang selanjutnya dijelaskan oleh A. Muhammad Ilyas (hasil wawancara):

“... Darul Islam sebagai organisasi yang menginginkan terbentuknya negara Islam benar-benar menetapkan aturan yang ketat terhadap pergaulan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah saat itu cara takbir saat melakukan shalat pun harus mengikuti aturan Islam yang benar”

Langkah terakhir yang dilakukan pemerintah adalah dengan jalan konfrontasi. Tahun 1962 dibentuklah kesatuan Operasi dengan nama “Operasi Tumpas”. Didalam operasi ini juga dirangkaikan dengan komando operasi bernama Operasi Kilat yang dipimpin langsung oleh Pangdam XIV Hasanuddin Brigjen Andi Muhammad Yusuf. Gencarnya operasi penumpasan yang dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan akhirnya membuat posisi Kahar semakin terdesak. Hingga akhirnya operasi tumpas mampu memukul mundur DI/TII dan menembak mati Kahar Muzakkar.

Secara otomatis, setelah Kahar dikabarkan tewas tertembak ditangan pasukan TNI, anggota-anggota DI/TII yang bergerilya di hutan menjadi patah arah. Satu persatu dari mereka keluar dari hutan dan menyerahkan diri kepada TNI, tak terkecuali di daerah Maros. inilah awal kehidupan di Maros yang bebas dari gerakan DI/TII.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maros memiliki peranan yang sangat penting pada masa pemberontakan DI/TII karena letak daerahnya yang strategis. Posisi Maros ibarat pintu masuk yang menghubungkan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, terutama daerah-daerah penghasil pangan seperti Bone, Soppeng, Palopo, Pangkep dan Wajo. Maros juga sebagai tempat persinggahan. Menguasai Maros berarti menguasai daerah yang menjadi kunci penghubung antara masyarakat daerah dan masyarakat yang ada dipusat pemerintahan Makassar. Selama kurung waktu 1953 sampai dengan 1965. Maros merupakan salah satu wilayah basis pertahanan DI/TII dengan beberapa tempat operasi. Pasukan DI/TII menguasai hampir setengah wilayah Maros seperti daerah Pappandangeng sampai Tompobulu, Pakkasalo, Pakere, Laiya, Camba, Moncongloe, Masale, Leang-leang, Lau, dan Marana. Namun dari struktur daerah di Maros, terdapat dua wilayah yang secara penuh menjadi basis perjuangan dan perekrutan anggota DI/TII karena keadaan alamnya yang bergunung-gunung dan banyak hutan lebat. Dua wilayah itu adalah Camba dan Moncongloe.

101

1. Bagi DI/TII wilayah Maros berada pada posisi yang sangat strategis untuk memudahkan langkah perjuangan mereka kedepannya. Tempat ini juga beberapa kali dijadikan tempat berkumpulnya kompi-kompi dari setiap batalyon yang akan beroperasi untuk meneruskan perjuangan mereka. Pasukan DI/TII menggunakan sistem pertahanan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai satu taktik yang paling ampuh dalam mendukung gerakan DI/TII. Kondisi wilayah Maros (Camba) dengan medan yang dipenuhi lereng-lereng yang curam membantu DI/TII dapat bertahan lama di wilayah ini. Selain wilayah bergunung-gunung, Maros memiliki wilayah dengan banyak hutan lebat yaitu Moncongloe. Berbeda dengan gerakan pemberontakan DI/TII yang berlangsung di Camba, gerakan DI/TII di Moncongloe lebih dikenal sebagai gerakan pemberontakan yang brutal dengan banyak melakukan kekacauan.
2. Keberadaan pasukan DI/TII membawa banyak dampak khususnya di Kabupaten Maros yang menjadi salah satu wilayah teritorial gerakan ini. Di Bidang sosial Politik kehadiran DI/TII menimbulkan keresahan dan ketidakamanan bagi masyarakat. Saat itu, masyarakat Maros mengalami berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan DI/TII. Menurut Anhar Gongngong gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar juga menimbulkan kekacauan dalam bidang pemerintahan di distrik yang dikuasainya sebab roda pemerintahan semakin sulit dijalankan karena daerah itu menjadi tidak lagi sepenuhnya berada di bawah pemerintahan RI melainkan di bawah kekuasaan DI/TII. Berakhirnya gerakan DI/TII di Maros diawali dengan dikabarkannya Kahar Muzakkar tewas tertembak ditangan pasukan TNI. Secara otomatis, anggota-anggota DI/TII yang bergerilya di hutan menjadi patah arah. Satu persatu dari mereka keluar dari hutan dan menyerahkan diri kepada TNI, tak terkecuali di daerah Maros. inilah awal kehidupan di Maros yang bebas dari gerakan DI/TII.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejarah Maros pada masa DI/TII telah memberikan gambaran bagi kita bagaimana keadaan masyarakat Maros pada masa itu, diawali dengan mudahnya masyarakat menerima segala bentuk gerakan yang mengatasnamakan agama (Islam) merupakan satu kelemahan karena mereka tak pernah memahami dampak yang akan ditimbulkan dari sebuah gerakan radikal semacam itu. Oleh karena itu, belajar dari sejarah ini kita sebaiknya mulai menanamkan rasa Nasionalisme di jiwa generasi muda kita, sebab dengan rasa Nasionalisme yang kuat akan melemahkan rasa fanatisme terhadap agama, suku maupun golongan.
2. Sebaiknya pembelajaran sejarah lokal bagi anak didik sering diberikan agar mereka tak hanya menguasai sejarah nasional melainkan juga sejarah daerahnya sendiri.
3. Sebaiknya pemerintah menjaga dan melastarikan aset-aset yang bernilai sejarah terutama sejarah lokal.

**DAFTAR RUJUKAN**

1. **Badan Arsip Nasional Republik Indonesia**

Arsip Nasional Republik Indonesia 1950-1960

Sura Kepala Kampung Makkaraeng No. 23. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Inventaris Maros Vol. I Tahun 1950-1959

1. **Sumber Buku dan Artikel**

Jary. Julia  dan Jary. David. 1995. *Collins Dictionary of Sociology,* Ed. II. London : Harper Collins Publisher

Kuntowijoyo. 2003. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang

Maran, Rafael Raga . 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*.  Jakarta : Rineka Cipta

Markas Besar TNI. 2000. Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). Jakarta: Pusat Sejarah Dan Tradisi TNI

Ritzer, George dan Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta : Kencana

Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak

1. **Narasumber Wawancara**
2. Nama : H. Lahami Dg. Parenrengi

Usia : ± 86 Tahun

Pekerjaan : Anggota Veteran

Alamat :Lingkungan Kassi Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros

Status/Peranan (1953-1965) : Warga Masyarakat

Tanggal Wawancara : 28 April 2015

Pukul : 20.00 WITA

1. Nama : A. Muhammad Ilyas

Usia : ± 73 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Desa Laiya Kecamatan Cenrana Maros

Status/Peranan (1953-1965) : Mantan Anggota DI/TII di wilayah operasi

Laiya

Tanggal Wawancara : 14 Mei 2015

Pukul : 15.30 WITA

1. Nama : Dg. Esa

Usia : ± 85 Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : Mandai

Status/Peranan (1953-1965) : Warga Masyarakat

Tanggal Wawancara : 2 Mei 2015

Pukul : 16.30 WITA

1. \* Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

   \*\* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Sejarah [↑](#footnote-ref-2)